

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Amak Nasrul

Ilmi Usrotin Choiriyah

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April 2025



Pendahuluan

- Salah satu strategi yang diusulkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa. Tujuan utama BUMDes adalah untuk mengelola potensi ekonomi desa secara profesional dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakatnya (Kemendesa, 2017).
- Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulanggin, Kabupaten Sidoarjo, mempunyai BUMDes yang diharapkan menjadi sebuah solusi alternatif untuk meningkatkan pengembangan dengan menggerakkan masyarakat desa untuk ikut serta dalam pelatihan yang disponsori pemerintah desa ketapang. Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan yaitu mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Ketapang membantu pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada pengelola BUMDes di Desa Ketapang

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- **Bagaimana Peran Pemerintah Desa Ketapang dalam pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?**

Dalam pelaksanaannya, ditemukan kendala yang menghambat peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ketapang yakni mencakup:

- Pertama, pengurus BUMDes belum punya inovasi.
- Kedua, pengurus BUMDes kurang memiliki kapabilitas.
- Ketiga, pengurus BUMDes masih kurang aktif dalam menggunakan media sosial untuk mempromosikan wisata, membuat potensi BUMDes tidak diketahui masyarakat umum.
- Keempat, kurangnya partisipasi pemuda Desa Ketapang dalam memberikan ide dan inovasi terhadap BUMDes.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Creswell (2002) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menjelaskan informasi, data dan berbagai pertanyaan secara menyeluruh melalui pengamatan di lapangan dan responden.

Lokasi penelitian berada di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara terstruktur, yang meliputi:

- Observasi, dilakukan melalui pengamatan langsung dengan pencatatan kondisi atau perilaku objek sasaran,
- Wawancara, dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden terkait,
- Dokumentasi, digunakan untuk melengkapi dan meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan, serta sebagai bahan referensi dalam memverifikasi keabsahan data

Informan untuk penelitian ini meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan pengurus BUMDes Delta Mandiri.

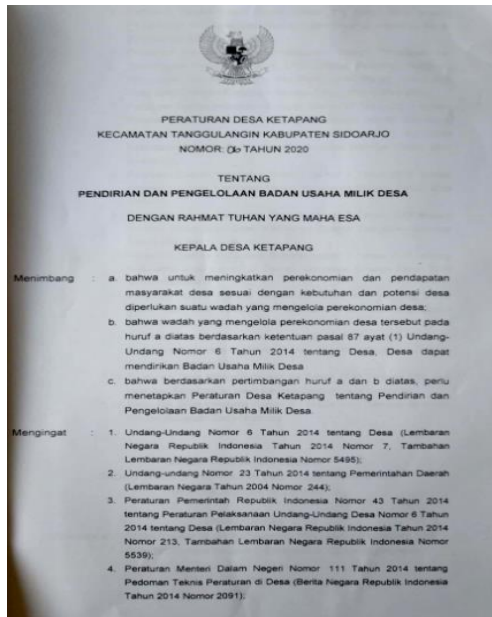
Fokus pada penelitian ini adalah mengenai Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ketapang yang mana akan diukur menggunakan Teori Peran menurut Arif yang dikutip dari Adhawati (2012:9) dengan menggunakan 4 indikator yakni peran pemerintah sebagai :

1. Regulator
2. Dinamisator
3. Fasilitator
4. Katalisator

Hasil dan Pembahasan

A. Regulator

1. Pengaturan Kebijakan



Sumber: Perangkat Desa Ketapang

Bidang:		: 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
Sub Bidang:		: 2.8. Sub Bidang Pariwisata						
Kegiatan		: 2.8.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa						
Waktu Pelaksanaan		: 3 Bulan						
Output/Keluaran		: terwujudnya desa wisata						

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/(BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	BELANJA			0.00			Rp 230.000.000,00	Rp 230.000.000,00
	01. pembangunan desa wisata/affor Desa Ketapang			0.00			Rp 230.000.000,00	Rp 230.000.000,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			0.00			Rp 230.000.000,00	Rp 230.000.000,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Upah Tenaga Kerja			0.00			Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00
	01. Belanja upah tenaga kerja pembangunan DDS	0 Ls	0.00	0.00	1 Ls	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			0.00			Rp 180.000.000,00	Rp 180.000.000,00
	01. Belanja bahan material pembangunan desa wisata DDS	0 Ls	0.00	0.00	1 Ls	Rp 180.000.000,00	Rp 180.000.000,00	Rp 180.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			0.00			Rp 230.000.000,00	Rp 230.000.000,00

Sumber: Data Diolah Penulis Dari Proposal Revitalisasi Sungai Califour, 2024

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam peran pengaturan kebijakan pemerintah desa memberikan dukungan dan memberikan pengaturan kebijakan dalam mengembangkan BUMDes Delta Mandiri. Peran Pemerintah Desa Ketapang akan selalu meningkatkan perannya sebagai regulator dengan menerapkan kebijakan – kebijakan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

Hasil dan Pembahasan

2. Partisipasi Masyarakat

Peran Pemerintah sebagai Regulator pada sub variabel Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Desa beserta Ketua BUMDes Delta Mandiri di Desa Ketapang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dengan memberi sebuah sosialisasi kepada masyarakat, Mengadakan workshop dan pelatihan yang membahas ide – ide untuk mengembangkan wisata califour, mengembangkan produk krupuk ikan serta mengenalkan kampung degan kepada masyarakat publik

Dalam hal kepengurusan tersebut memiliki tugas penting dalam mengurus unit yang ada di BUMDes, namun yang menjadi kendala sampai sekarang yakni belum ada tempat untuk pemuda – pemudi yang mendapat tempat dalam kepengurusan yang kemungkinan pemuda desa ketapang juga bisa memberikan ide – ide yang dapat menyongsong perkembangan BUMDes. Selain itu pemuda di Desa Ketapang juga kurang aktif karena masih ada kesenjangan antara orang yang lebih tua dengan pemuda desa ketapang.

SUSUNAN PENGURUS BUMDes "Delta Mandiri" DESA KETAPANG KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO		
NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN / NAMA
1.	Pembina/ Penasihat	1. Kepala Desa Ketapang Ibu Widia Herlita, S.STP, MM 2. BPD Desa Ketapang
2.	Ketua	Bapak Wiknyo
3.	Sekretaris	Bapak Safi'i
4.	Bendahara	Ibu Haja Indahyani
5.	Anggota	1. Ubait Annajmussyakib 2. Moh. Aiyub 3. Mokhammad Munif 4. Su'udin 5. Slamet Arifin 6. M. Abas 7. M. Ali 8. Mokhammad Makhfud 9. Nurul Hidayat

Hasil dan Pembahasan

B. Dinamisor

1. Inovasi Dan Kreativitas

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisor pada sub variabel inovasi dan kreativitas dengan cara menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dengan mengadakan forum diskusi dan musyawarah desa untuk menggali ide – ide baru dari masyarakat desa setempat tentang pengembangan BUMDes di Desa Ketapang. Selain itu pemerintah desa juga harus memberikan pelatihan keterampilan seperti mengadakan pelatihan bagi pengurus BUMDes dan masyarakat Desa Ketapang tentang kewirausahaan, manajemen usaha, serta pemasaran produk. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan oleh pengurus BUMDes dan masyarakat di Desa Ketapang untuk berinovasi.

pada peran pemerintah sebagai dinamisor tetap melakukan berbagai cara seperti study banding dan pelatihan untuk dapat mengembangkan inovasi dan kreativitas bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa di Desa Ketapang. Hal ini di respon oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa untuk lebih bersemangat dalam melakukan study banding dan pelatihan produk kerupuk ikan dalam meningkatkan cita rasanya. Akan tetapi di unit lain seperti Kampung degan masih terdapat kendala yang belum terselesaikan dikarenakan dari 4 stand yang ada masih hanya 1 stand yang disewa dan tempat penyewaan stand tidak strategis dan hal ini masih dalam evaluasi oleh pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa Ketapang serta belum ada tindakan untuk unit wisata califour.

Hasil dan Pembahasan

2. Pengembangan Jaringan

wawancara peneliti bersama Ibu Widia Herlita selaku Ibu Kepala Desa Ketapang yang menyatakan: “pemerintah desa itu kita harus di depan kita di tengah dan kita di belakang, dari depan kita memberi contoh dari tengah kita menyemangati dari belakang kita mendorong dan support semua keperluan BUMDes serta kita melakukan konsultasi bisa melalui by phone(call) selama 24 jam. Karena dalam promosi ini memang jadi kenda (produk krupuk ikan) tetapi kami terus belajar bagaimana cara melakukan promosi dan bagaimana berinovasi supaya produk kita tidak sama dengan lainnya seperti kami juga bermitra atau bekerja sama dengan pihak umsida”. Hasil wawancara pada tanggal 9 September 2024.

Pemerintah Desa Ketapang selalu memberi contoh, menyemangati dan memberi dukungan support terhadap pengurus Badan Usaha Milik Desa di Desa Ketapang agar kedepannya bisa terus berkembang dan mengatasi masalah yang ada. Pemerintah Desa Ketapang juga membantu pengurus BUMDes untuk meningkatkan penjualan produk krupuk ikan dikarenakan hal promosi ini termasuk masalah yang sulit bagi Pengurus Badan Usaha Milik Desa dan Pemerintah Desa Ketapang. Tidak hanya pengurus bumdes, pemerintah desa, masyarakat, tetapi Ibu Widia Herlita sebagai Ibu Kepala Desa di Desa Ketapang juga ikut mempromosikan produk kerupuk ikan ini ke kecamatan bahkan sampai ke koperasi wanita kabupaten sidoarjo seperti apa yang dikatakan Bapak Wiknyo selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa di Desa Ketapang yang bertujuan agar produk asli dari Desa Ketapang yakni krupuk ikan bisa lebih dikenal tidak hanya di sidoarjo tetapi masih kurangnya dalam pengarahan/bimbingan yang membuat pengurus Badan Usaha Milik Desa merasa kesulitan dalam melakukan promosi produk

Hasil dan Pembahasan

C. Fasilitator

1. Pelatihan dan pengembangan

Pada Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator dalam sub variabel Pelatihan dan Pengembangan yakni Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa terkait pelatihan dengan peningkatan skill, kewirausahaan, manajemen usaha dan pemasaran produk. Pemerintah Desa juga menjadi penasihat dan menjadi pengawas untuk membantu membimbing BUMDes di Desa Ketapang menjadi lebih baik.

“sebelum melakukan pelatihan kami sebagai pemerintah desa melakukan sosialisasi dan melakukan study banding di daerah Mojokerto untuk belajar bagaimana cara membuat dan mengelola usaha kerupuk ikan”. Hasil wawancara pada tanggal 5 Agustus 2024.

2. Penyedia Sumber Daya

Modal

Pemerintah Desa Ketapang siap membantu dalam masalah dana untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ketapang. Dalam menyediakan fasilitas modal ini tujuannya untuk pengembangan infrastruktur, membeli peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran semua kegiatan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dan Pembahasan

D. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

1. Penggerak Perubahan

Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator pada sub variabel penggerak perubahan yaitu membantu pengurus Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola unit yang ada agar dapat membantu perekonomian masyarakat desa dengan contoh menjadi mediator terhadap permasalahan yang dialami pengurus BUMDes seperti mencari cara agar unit wisata califour lebih dilihat oleh masyarakat luar di daerah Kabupaten Sidoarjo maupun di luar daerah Kabupaten Sidoarjo.

2. Pembangunan Kapasitas

Rencana Anggaran Biaya
Desa Ketapang

PENDAPATAN DESA	
Pendapatan Asli Desa	Rp 271.000.000,00
Dana Desa (APBN)	Rp 742.162.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	Rp 300.582.000,00
Bantuan Keuangan kabupaten	Rp 202.298.143,00
BELANJA DESA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 741.614.873,41
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 842.700.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 75.210.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 166.120.400,00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan mendesak Lainnya	Rp 137.000.000,00
PEMBIAYAAN	
Silpa Tahun Sebelumnya	Rp 513.142.931,00
Penyertaan Modal Desa	Rp 36.130.854,28

Temuan Penting Penelitian

Temuan penting dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan program-program untuk implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketapang ini tidak lepas dari tantangan-tantangan yang ada. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan SDM. Dengan jumlah penduduk relatif kecil akibat dampak dari bencana Lumpur Lapindo, Desa Ketapang menghadapi kesulitan dalam mobilisasi SDM untuk mengelola dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini diperburuk oleh kondisi komunikasi menjadi aspek lain yang membutuhkan perhatian. Pemanfaatan media digital seperti akun media sosial desa juga belum optimal, dengan minimnya aktivitas yang memperbarui informasi terkait kegiatan desa.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Penelitian ini memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang Peran Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa. Dengan menggunakan teori Peran menurut Arif yang dikutip dari Adhawati (2012:9) , penelitian ini memberikan contoh nyata bagaimana kebijakan dapat diukur dan dianalisis melalui empat indikator utama (Regulator, Dinamisor, Fasilitator, Katalisator). Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memperluas pemahaman terhadap dinamika kebijakan di tingkat desa.

Referensi

[1]Bagus Yuliat, S. (2023). (2024). 1 , 2 1,2. 3(9), 727–746.

[2]Chintary, Valentine QueenChintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). (2016). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5(2), 59–63. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2017>

[3]Chintary, V. Q., Asih, D., & Lestari, W. (2016). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Jisip, 5(2), 59. www.publikasi.unitri.ac.id

[4]Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. E-Journal Universitas Panji Sakti, 9(1), 51–60.

[5]Fifianti, F., Alias, A., & Mone, A. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappkasunggu Kabupaten Takalar. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 4(3), 282. <https://doi.org/10.26618/kjap.v4i3.1644>

[6]Hasanah, H., & Jupriyanti, S. D. (2023). Strategi BUMDes untuk Meningkatkan Kolaborasi Lintas Agama: Studi Kasus di Desa Kulu, Pekalongan. Jurnal Pendidikan Non Formal, 1(2), 10. <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i2.152>

[7]Novita Riyanti, & Hermawan Adinugraha, H. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam, 2(1), 80–93. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.80-93>

[8]Putri Nugrahaningsih, H. M. (2018). (2018). Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa . Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa itu adalah dengan dibentuknya Wisata yang nantinya menjadi proyek percontohan bagi desa-desa lain nya s. 1.

[9]Rahmatika, D. N., Subroto, S., Indriasih, D., & Prihadi, D. (2021). Strategi Pengembangan Kualitas Bumdes; Pendekatan Model Tetrapreneur Serta Kemitraan Dengan Perguruan Tinggi Dan Perbankan. Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan, 2(2), 84–95. <https://doi.org/10.36441/kewirausahaan.v2i2.58>

Referensi

- [10]Robert.M. Z. Lawang (1990:2.39). (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori. Jurnal Eksekutif, 1(1).
- [11]Ubi Laru, F. H., & Suprojo, A. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(4), 367–371. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>
- [12]UU No. 23 Tahun 2014. (2014). UU No. 23 Tahun 2014. 1–203.



